

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Perjanjian Lama, dengan keras melarang praktik suap menyuap. Dalam enam ratus tiga belas (613) Hukum Taurat, salah satunya melarang menerima suap demi terciptanya kehidupan yang adil dan bermoral. Menerima suap sebenarnya secara tidak langsung merendahkan diri manusia dan melupakan perintah Allah.¹ Amsal mengajarkan tentang suap yang mempunyai pengaruh yang kuat sehingga banyak orang terjerumus kepada permainan suap. Suap dikaitkan dengan batu yang berharga sehingga mampu menghasilkan keuntungan yang besar bagi pemiliknya. Suap sangat identik dengan kemujuran dalam hal apapun, tak terkecualipun di dalam keagamaan. Hal yang lain, suap menjauhkan berbagai masalah dari seseorang, seperti pemutusan keadilan serta mendapatkan kedudukan instan. Dengan demikian, suap merupakan “jendela kejahatan” yang menjadi jalan untuk memuluskan rencana dalam meraih dan dapatkan kedudukan.²

¹ Denis Green, *Pengenalan Perjanjian Lama* (Malang: Gandum Mas, 2019), 70.

² Dwi Maria Handayani, “Korupsi: Studi Perbandingan Berdasarkan Dunia Timur Kuno Dan Perjanjian Lama,” *Pengarah: Jurnal Teologi Kristen* Vo. 1 No.1 (2019): 5.

Demikian yang menjadi sorotan Nabi Mikha terhadap para pemimpin, nabi, imam yang menerima suap. Pada zaman nabi Mikha, orang-orang mengharapkan bimbingan dari seorang iman dan nabi dalam kehidupan sehari-hari. Namun karena suap, imam dan nabi hanya menerima yang mampu membayar sesuai yang diinginkan. Untuk itu, nabi Mikha sangat mengecam tindakan para kepala (hakim), imam dan nabi yang berlaku jahat. Kecemannya tidak mempersoalkan panggilan dan tidak menanyakan atas karunia dan dari mana memperoleh hak kenabian. Namun yang Mikha persoalkan penyalahgunaan panggilan kenabian dan penggunaan karunia ilahi yang semata untuk kepentingan diri sendiri. Apa yang dikecam oleh nabi Mikha mengarah kepada ketidakadilan yang membatasi akses Firman Tuhan yang berlaku hanya bagi orang yang mampu membayar, itupun apa yang disampaikan hanyalah kata-kata berkat agar menyenangkan hati pendengarnya, meskipun kehidupan orang yang memberi suap ada dalam kefasikan. Imam yang harusnya memberikan pengajaran tanpa upah, justru mengubahnya dengan profesi sehingga orang-orang harus membayar mahal, sehingga tidak mungkin pada zaman Mikha orang miskin dan lemah dapat menikmati pengajaran seorang imam dan nabi. Orang yang melabeli dirinya

sebagai pemimpin agama, hanya melakukan tugasnya dengan bayaran.³ Nabi dan imam tidak lagi memperlihatkan tugas dan tanggung jawab untuk mengajarkan kebenaran. Tidak ada lagi perasaan takut dan segan untuk menerima suap, padahal nabi dan imam tahu hal tersebut melanggar hukum Tuhan.

Di dunia Timur Dekat Kuno seperti di Babilonia Kuno, koneksi sangat dibutuhkan oleh para imam. Imam harus memberi suap demi sebuah jabatan. Jabatan imam sangat dibutuhkan pada masa Babilonia Kuno, karena apabila seseorang menjabat sebagai imam, maka akan mendapatkan keuntungan seperti emas, perak, tekstil wol, makanan dan berbagai keuntungan lainnya.⁴ Perilaku tersebut memunculkan kritik terhadap kehidupan imam, yang mestinya tidak melakukan suap. Begitupun dalam Kitab Mikha, nabi Mikha mengecam imam dan yang bekerja demi keuntungan. Jabatan seolah hanya dipakai untuk melindungi diri, dan karena memang jabatan imam diperoleh dengan cara menyuap pemimpin yang memiliki kuasa.⁵

³ *Tafsiran Alkitab Masa Kini 2: Ayub-Maleakhi* (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2021), 668.

⁴ Schneider Tammi J., *An Introduction to Ancient Mesopotamian Religion*. (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing, 2011), 83.

⁵ Maria Handayani, "Korupsi: Studi Perbandingan Berdasarkan Dunia Timur Kuno Dan Perjanjian Lama," 5.

Bagitupun pada masa reformasi berkembang, ada seruan dari masyarakat agar sistem politik di Indonesia lebih baik, bermoral dan benar-benar demokratis. Namun, dalam kenyataannya, cara berpolitik di Indonesia belum mencerminkan seperti yang digaungkan oleh sebagian masyarakat di era reformasi. Terutama pada gelaran pesta demokrasi yang selalu menjadi tempat suap menyuap. Adanya kepentingan pribadi, menyebabkan rusaknya sistem berdemokrasi. Dengan praktik-praktik politik yang curang, membuat demokrasi tidak sehat dan tidak berjalan semestinya.⁶ *Money politic* (politik uang) adalah salah satu bentuk suap. Politik uang sendiri masih bervariasi, ada yang berbentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), jasa, maupun kontrak politik transaksional. Masifnya suap dalam bentuk politik uang terjadi pada saat pasca Reformasi tahun 1998, dimana sistem demokrasi di Indonesia diubah menjadi pemilihan langsung oleh rakyat. Tetapi tidak mengatakan bahwa sebelum Reformasi, Indonesia termasuk Toraja (Toraja Utara dan Tana Toraja) bebas dari politik uang.⁷

Sebagaimana tradisi atau budaya yang sudah mendarah daging dalam diri manusia, kelompok, maupun masyarakat. Demikian juga halnya pada

⁶ Hartuti Purnaweni, "Demokrasi Indonesia: Dari Masa Ke Masa," *Administrasi Publik* 3, No. 2 (2004): 128.

⁷ Alpius Pasulu, *Demokrasi Toraja Dalam Pusaran Budaya Populer Politik Uang* (Yogyakarta: Penerbit Gunung Sopai, 2020), 132.

praktik suap dalam bentuk politik uang yang kian mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Toraja terkhusus pada gelaran pesta demokrasi. Sehingga praktik politik uang perlu disikapi karena seolah-olah telah menjadi penyakit sosial (*social ills*) dalam kehidupan masyarakat Toraja. Padahal masyarakat Toraja dikenal berbudaya luhur, bermartabat, dan sebagian besar penduduknya mayoritas Kristen yang menjunjung tinggi keadilan, kebenaran, dan kejujuran.⁸

Keseriusan dalam menyikapi politik uang di Toraja, diperlihatkan Gereja Toraja menyikapi praktik politik uang dengan mengadakan pertemuan di depan kantor Badan Pekerja Sinode (Tongkonan Sangulele), dengan Aliansi Toraja Lawan Politik Uang dalam acara *Coffee Morning* dan Diskusi Publik pada 25 Juni 2019.⁹ Pertemuan ini didasarkan atas keresahan yang terjadi akibat maraknya politik uang yang dilakukan oleh para politikus. Dengan demikian, harapan Gereja Toraja pesta demokrasi yang bebas *money politic*. Sehingga para pemimpin yang terpilih murni dari hati nurani rakyat, berdasarkan hikmat Tuhan dan tentunya dengan pimpinan Roh Kudus, membawa perubahan-perubahan bagi daerah yang dipimpinnya. Permasalahan politik uang di Toraja lahir dari situasi yang tidak disengaja, tidak diinginkan, dan tidak

⁸ Ibid.

⁹ GetorApp Video, <http://www.youtube.Com/@getorappvideo4797> diakses 15 Oktober, 2023.

direncanakan. Lahirnya politik uang kemungkinan disebabkan ketidakmatangan dan kedewasaan para politikus dan rakyat dalam berdemokrasi, ambisi dan motivasi yang keliru, dan ketidakpastian penegakan hukum.¹⁰

Orang Toraja menjunjung tinggi harga dirinya dan marbatnya, yang dituangkan dalam salah satu budaya orang Toraja yaitu budaya *longko'*. *Longko'* kini tidak lagi pada nilai yang sesungguhnya, bahkan hanya dinilai sebagai ungkapan rasa malu atau *malongko'*, Namun, jika ditelusuri lebih jauh, nilai yang ada dalam budaya *longko'* sangatlah penting dan dapat menjadi acuan kehidupan orang Toraja untuk menjaga harga diri dan martabat keluarganya atau *Tongkonannya*.¹¹ Oleh karena itu, *longko'* harus kembali dihidupkan dalam kehidupan masyarakat Toraja, untuk menolak segala bentuk praktik-praktik yang menyimpang dari kebenaran.¹² *Longko'* merupakan rasa segan terhadap hal yang salah, apalagi jika tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam kehidupan orang Toraja. Nilai-nilai seperti inilah mestinya tetap dipelihara

¹⁰ Pasulu, *Demokrasi Toraja Dalam Pusaran Budaya Populer Politik Uang*, 132.

¹¹ Diks Pasande', "Budaya Longko' Orang Toraja Dalam Perspektif Lawrence Kohlberg," *Jurnal Filsafat* 3 No.2 (2013): 9.

¹² Daniel Fajar Panuntun, *Nilai Hospitalitas Dalam Budaya Longko Torayan* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2020), 19–22.

demis tatanan kehidupan yang harmonis, menjadi standar kehidupan serta menjadi ciri khas setiap kebudayaan dalam satu masyarakat.¹³

Berdasarkan masalah tersebut, maka penulis akan mengkaji masalah melalui hermeneutik Mikha 3:11 tentang suap sebagai upaya menolak politik uang, dengan menggunakan metode kritik gramatikal historis, serta relevansinya terhadap budaya *longko'*.

B. Fokus Masalah

Dari penjelasan latar belakang, penulis akan berfokus pada hermeneutik Mikha 3:11 tentang suap sebagai upaya menolak politik uang dan relevansinya terhadap budaya *longko'*.

C. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang dan fokus masalah, maka yang menjadi rumusan masalah ialah bagaimana hermeneutik Mikha 3:11 tentang suap sebagai upaya menolak politik uang dan relevansinya terhadap budaya *longko'*?

¹³ Robi Panggarra, *Upacara Rambu Solo' Di Tana Toraja* (Bandung: Kalam Hidup, 2015), 1.

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ialah relevansi antara hermeneutik Mikha 3:11 tentang suap sebagai upaya menolak politik uang dan budaya *longko'*.

E. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat dari penelitian penulis sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik
 - a. Dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan kajian Biblika Perjanjian Lama khususnya Hermeneutik Perjanjian Lama, tafsir Perjanjian Lama, dan Teologi Perjanjian Lama.
 - b. Pada bidang politik, dapat memberikan edukasi terhadap pemerintah maupun masyarakat cara berpolitik yang benar.
 - c. Dapat memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat Toraja tentang nilai yang ada dalam budaya *longko'*.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penulis, dapat memahami dengan baik nilai yang ada dalam budaya *longko'* baik dari sejarah, definisi maupun seberapa besar masyarakat Toraja yang masih menjadikan budaya *longko'* sebagai identitas hidup.

- b. Bagi mahasiswa teologi, dapat memahami dan memperkaya pengetahuan tentang hubungan antara budaya dan teologi. Dengan demikian, setiap mahasiswa teologi diharapkan untuk mampu memahami setiap budaya disekitar dan dielaborasi dengan teologi untuk menciptakan kebaruaran sehingga budaya dapat menjadi sarana menyampaikan Injil.
- c. Bagi Gereja dapat memperkaya dalam memberikan ajaran-ajaran kepada warga jemaat, bahwa budaya adalah anugerah dari Allah yang harus terus dipelihara dan ajaran tentang politik uang bukanlah perbuatan benar bagi Allah.

F. Metode Gramatikal Historis

Dalam penafsiran, penulis menggunakan metode Gramatikal Historis. Metode ini menolong penafsir untuk memahami arti dan makna kata dalam teks, hubungan antar kalimat-kalimat dalam teks, gaya sastra yang digunakan oleh pengarang, serta sejarah yang mempengaruhi terbentuknya teks.¹⁴

Metode Gramatikal Historis merupakan gabungan dari dua metode penafsiran. *Kritik gramatikal* fokusnya lebih kepada struktur tata bahasa, arti kata dan kalimat. Sedangkan kritik historis (*Historical Criticism*) adalah metode yang

¹⁴ V. Dawan Cristine & Panjaitan Firman, *Kasih Setia* (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018), 212.

berusaha menentukan tahun, konteks awal, dan maksud masing-masing tulisan. Hal ini dilakukan dengan menggunakan tulisan-tulisan Kitab Suci serta berbagai sumber lain seperti penemuan-penemuan arkeologi dan literatur non-biblikal.¹⁵ Istilah *kritik* tidak dipahami sebagai sesuatu yang berusaha mencari kesalahan melainkan “analisis cermat”. Jadi, istilah *kritik* merujuk pada pendapat atau tindakan mengadili. Dalam bahasa Yunani: *krino* (kata kerja) yang berarti “menilai, menguji, dan tindakan evaluasi”. Sehingga kritik biasa juga diganti dengan analisis. Kritik Historis berorientasi untuk menemukan situasi historis, sumber-sumber yang digunakan penulis, gaya sastra, tanggal penulisan, penulis, penerima atau pembaca pertama, pendekatan-pendekatan untuk menentukan komposisi final teks, serta tujuan penulisan teks tersebut.¹⁶

Metode Kritik Gramatikal Historis adalah metode tafsir dengan fokusnya pada teks dengan memperhatikan struktur historis, gaya sastra, tata bahasa dan arti kata.¹⁷ Metode gramatikal historis menunjuk kepada usaha menafsirkan teks Alkitab sebagaimana makan aslinya (gramtika) dan sesuai

¹⁵ Jonar T.H. Situmorang, *Bibliologi* (Yogyakarta: ANDI, 2013), 235.

¹⁶ Dedy Hidnas Yan Nggadas, *Pengantar Praktis Studi Kitab-Kitab Injil* (Yogyakarta: ANDI, 2011), 130–131.

¹⁷ Rainer Scheunemann, *Pedoman Lengkap Penafsiran Alkitab Perjanjian Lama* (Yogyakarta: ANDI, 2009), 17.

dengan kemungkinan maksud penulisnya pada zamannya (historis).¹⁸ Dengan demikian, metode gramatikal historis adalah usaha memahami teks Alkitab dari sudut pandang penulis aslinya (manusia).¹⁹

Metode gramatikal historis digagas atas presuposisi, bahwa Alkitab diinspirasi dengan menggunakan bahasa tertentu (Ibrani, Aram, dan Yunani), dan Alkitab ditulis oleh orang-orang tertentu dalam zaman dan kebudayaan yang sangat beragam sehingga terdapat perbedaan pada zaman sekarang ini. Oleh karena itu, penafsir harus menyelidiki bahasa (linguistic) dan penyelidikan sejarah (historis). Dengan demikian, pendekatan gramatikal historis adalah pendekatan untuk memahami teks-teks Alkitab sehingga penafsir mampu menangkap makna dan maksud penulis asli. Pendekatan gramatikal historis tidak hanya meneliti pilihan kata, sintaks, tata bahasa, genre sastra, namun juga terlibat dalam studi perbandingan historis dengan dunia kuno.²⁰ Adapun langkah-langkah metode gramatikal historis:

1. Analisa Kata

Pemilihan kata yang tepat adalah langkah awal dalam penelitian

¹⁸ Jhon Rogerson, *Studi Perjanjian Lama Bagi Pemula* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019), 26.

¹⁹ Haposan Silalahi, "Historical-Gramatical: Sebuah Metode Heremeneuti Dalam Menemukan Makna Yang Tersembunyi Dalam Teks-Teks Alkitab," *Te Deum Teologi Dan Pembangunan Pelayanan* Vol. 1 (2018): 40.

²⁰ Ibid.

kata. Memahami setiap kata dalam penafsiran menjadi bagian penting untuk mengetahui makna yang terdapat dalam kata tersebut baik secara lisan maupun tulisan.²¹ Dalam analisis kata (lexiologi) mencakup penyelidikan etimologis seperti penyelidikan akar kata yang akan diklasifikasikan dalam kata benda, kerja, sifat, keterangan dan gender.

2. Analisis Tata Bahasa (Relasi Sintaksi)

Analisis ini bertujuan mengelompokkan setiap kata yang saling berkaitan yang ada dalam sebuah kalimat. Oleh karena itu, penafsir dituntut untuk memahami dengan baik aspek-aspek tata bahasa yang ada dalam setiap kalimat. Dalam sebuah kalimat terdiri dari beberapa aspek seperti kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Sehingga aspek yang harus dipahami gender, asal kata, tense, kata ganti dan artinya.²²

3. Analisis Genre

Setiap kitab tentu memiliki genre (gaya sastra) masing-masing. Ada banyak genre yang cukup terkenal seperti sejarah, narasi, hikmat, puisi, nubuat, Injil, surat, apokaliptik. Analisis genre menolong penafsir memahami ucapan-ucapan penulis seperti ucapan yang berbentuk

²¹ Craig L. Blomberg, *New Testament Exegesis: Panduan Komprehensif Eksegesis Kitab-Kitab Perjanjian Baru* (Malang: Gandum Mas, 2018), 163.

²² Silalahi, "Historical-Gramatical: Sebuah Metode Heremeneuti Dalam Menemukan Makna Yang Tersembunyi Dalam Teks-Teks Alkitab," 46–47.

metafora, antropomorfisme, hiperbola, perumpamaan, fabel, antropofatisme teka-teki, alegori. Dengan demikian, penulis dapat dengan mudah mengidentifikasi setiap genre pada setiap kitab. Analisis genre sangat menolong penafsir mengidentifikasi dinamika kelompok orang Yahudi maupun orang Kristen pada zaman dahulu.²³

4. Analisis Historis

Penyelidikan sejarah mencakup informasi seperti geografi, waktu, agama, politik, sosioekonomi, budaya dan tradisi, kebiasaan dan hubungan dengan bangsa lain. Pemahaman dan pengenalan akan konteks sejarah kitab, menolong penafsir memahami maksud penulis pada zamannya.²⁴

G. Sistematika Penulisan

1. BAB I PENDAHULUAN: Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA: Gambaran Umum Kitab Mikha yang mencakup tentang Nama Kitab, Penulis, Waktu Penulisan, Garis-Garis

²³ Hasan. Susanto, *Hermeneutik: Prinsip Dan Metode Penafsiran Alkitab* (Malang: Literatur SAAT, 2007), 296.

²⁴ *Ibid.*, 277.

Besar, Tema-Tema Utama, Tujuan Penulisan, Budaya *Longko'*, Politik Uang dan Pesta Demokrasi.

3. BAB III HERMENEUTIK MIKHA 3:11: Genre Kitab Mikha, Situasi Sosial, Agama, dan Budaya di zaman Mikha, dan Tafsiran Teks Mikha 3:11.
4. BAB IV RELEVANSI HERMENEUTIK MIKHA 3:11 DAN BUDAYA LONGKO: Suap dan *Longko'*, *Tongkonan* dan *Longko'* Sebagai Identitas Masyarakat Toraja, Gereja Toraja dalam menyikapi Suap (Politik Uang).
5. BAB V PENUTUP: Kesimpulan dan Saran.

